

PERAN *EPISTEMIC COMMUNITY* MENDORONG AS UNTUK MENANDATANGI PERSETUJUAN PEMBATAAN PENGGUNAAN NUKLIR PASCA PERANG DINGIN

Cifebrima Suyastri, Idjang Tjarsono
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini melihat peran dari *epistemic community* dalam mendorong Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dalam pembatasan penggunaan nuklir pasca perang dingin, karena pengakuan untuk *epistemic community* bukan hanya berdasarkan *sharing* dari kriteria epistemik, tetapi juga atas dedikasi aktif dari para ahli yang diakui secara kolektif dan kemampuan mereka untuk come along dengan usulan-usulan dan argumen-argumen baru tentang arms controllers dan itu dapat dimantapkan dengan mengutarakannya kepada policy makers yang notabene mempunyai kekuatan teknologi, military superiority dan "victory" in nuclear war. *Epistemic community* ini telah melakukan berbagai macam upaya untuk meyakinkan pemerintah nasional Amerika Serikat dimana *epistemic community* menyatakan bahwa melakukan pengembangan teknologi nuklir yang berlebihan dan perlombaan senjata nuklir yang terus meningkat, menimbulkan dampak-dampak negative diantaranya dalam bidang militer, ekonomi, politik. Tiga penyebab utama yang akan menimbulkan kehancuran paling besar di sekitar daerah ledakan nuklir, yaitu hempasan, panas, dan radiasi. Bahaya dari penyebaran nuklir dapat dirumuskan sebesar $r = N^2$, dimana r menunjukkan pada risiko akan timbulnya perang nuklir, sedangkan N menunjukkan jumlah negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir. *Epistemic community* dalam batas-batas tertentu telah berhasil memunculkan ide, gagasan, persepsi yang dapat diterima oleh pemerintah Amerika Serikat, yang pada akhirnya membawa mereka untuk sampai pada suatu keputusan yang setuju menandatangani persetujuan pembatasan persenjataan strategis (khususnya dalam hal senjata nuklir). Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor di dalam mendorong kerjasama tersebut.

Keyword : Epistemic Community, Nuklir, Gagasan, Perlombaan Senjata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrol dari *epistemic community* sebagai ilmuwan informal (di luar struktur kelembagaan pemerintah) dan rakyat sipil yang memiliki kemampuan strategis dalam segi intelektual. Pasti banyak dari anggota *epistemic community* yang tidak dapat melakukan dan bekerja dengan baik, kadang-kadang mereka juga mengalami *institutional conflicts*. Banyak dari mereka yang mempunyai kontribusi intelektual dalam bidang-bidang kepemilikan dari keahlian dan strategi nuklir dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



memunculkan diskusi, argumen, dan *mutual critism*. Hal tersebut dapat menolong mereka membentuk konsensus yang didasarkan pada konsep-konsep yang ada, mengatasi hambatan interdisipliner dan menciptakan *common vocabulary*. Selanjutnya kesemuanya itu dapat dimantapkan dengan mengutarakannya kepada *policy makers* yang nota benemempunyai kekuatan teknologi, *military superiority* dan “*victory*” in nuclear war.

Pengakuan untuk *epistemic community* bukan hanya berdasarkan *sharing* dari criteria epistemik, tetapi juga atas dedikasi aktif dari para ahli yang diakui secara kolektif dan kemampuan mereka untuk *come up* dengan usulan-usulan dan argument-argumen baru tentang *arms controllers*. Hal itu membutuhkan integritas ilmu pengetahuan untuk kemudian melegitimasi dan kekuasaan dalam kerangka sistem politik yang ada. Mereka mempunyai *public figure* yang tentu mempunyai kekuatan legitimasi, dan mempunyai *personal link* dengan *policy makers* (seperti Paul Nitze). Mereka berpartisipasi dalam proyek pemerintah dan mengadakan negosiasi sepanjang mereka pesimis tentang solusi teknologi untuk perang nuklir yang berbahaya. Kita harus berhati-hati tidak untuk the arms control epistemis dengan sebuah profesi. Community tersebut berlawanan dengan profesi, didalamnya hanya bagian dari waktu. Mereka mengungkapkan resiko dari setiap keputusan yang dikeluarkan aktor-aktor dan standar mereka dari code profesional. Komunitas ini dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi, *political driven*, yang berisi ideologi sendiri, dan contoh yang representatif mewakili keseluruhan perbedaan dari “scientific estate”.

Pada tahun 1955-1960 muncul pemahaman baru tentang konsep perang berdasarkan asumsi bahwa perlombaan nuklir dapat menyebabkan instabilitas dalam politik internasional. Aktor-aktor ABM (Anti Ballistic Missile) system kemudian menjadi kelompok pertama yang menentang perang nuklir dan membela anti perang nuklir dengan mendasarkan gagasan mereka pada metode ilmu pengetahuan. Mereka juga mendesak organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah nasional dalam menciptakan keputusannya bahwa keadaan bahaya karena perang nuklir tidak mempunyai solusi moral. Untuk meredakan keadaan tersebut, maka perlu dimunculkan *prudential behaviour* dalam melakukan diplomasi.

Hal penting dari penelitian ini adalah membawa fakta bahwa kerjasama yang diputuskan para ilmuwan Amerika Serikat kembali ke sistem politik Uni Soviet,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dimana mereka menjadi satu kelompok yang memahami tentang apa yang harus dilakukan untuk mengontrol permasalahan perlombaan nuklir. Sebagai contoh *Walt Rostow* dan *Jerome Wiesner* sebagai aktor yang bermain didalam pemerintahan *John F. Kennedy* membicarakan permasalahan keamanan internasional dengan Soviet di Moskow dalam pertemuan Pugwash pada Desember 1960 dan mereka kembali dengan pelucutan senjata dengan keyakinan bahwasannya US siap untuk menerima kerjasama pengendalian senjata. Pertemuan Pugwash membawa kesepakatan perjanjian larangan percobaan atau hal serupa, tapi yang lebih penting lagi, peraturan dalam perkembangan beberapa teknik yang mendasar untuk pengendalian senjata.

Beberapa perkembangan yang ada mulai memasuki batas pemerintahan selama memasuki tahun-tahun positive bagi ide pengendalian senjata nuklir membawa pengaruh juga bagi perubahan yang ada.

Pertama perencanaan Baruch pada tahun 1946 untuk meninggalkan kebijakan yang mengesampingkan pengembangan pengendali-pengendali nuklir. Artinya, pada era ini mulai muncul dorongan-dorongan untuk melakukan pengendalian terhadap perkembangan teknologi persenjataan nuklir.

Kedua seperti catatan Sims bahwa ketidakyakinan negosiasi perlucutan pada tahun 1950an “memiliki pengaruh yang kuat dalam ide perubahan control senjata. Naik turunnya dari negoisasi itu sendiri menilhami perdebadan kontroversi dan komentar. Pada proposal Open Skies 1955 memadukan pemikiran tentang batas kesepakatan dan negoisasi bilateral. Persiapan konvrensi Surprise Attack menghasilkan studi RAND sebagai tehnikal keperluan dari strategi stabilitasi. “atom untuk kedamaian” 1953 menghasilkan pertimbangan informasi pengendalian dan saling berbagi sebagai instrument dari stabilitasi.

Ketiga inti dari kepentingan dalam ide baru tentang pengendalian senjata yang bergeser dari Departemen pemerintahan, dimana John Foster Dulles tidak antusias untuk adanya pengalihan pengendalian senjata ke White House, dan presiden Eisenhower, dengan bantuan dari asisten pengendali persenjataannya Harlond Statess dan Nelson Rockefeller menemukan pengendalian nuklir sebelum para ahli strategi menemukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4. Keempat ide dari perjanjian larangan percobaan berlanjut pada perkembangannya sampai tahun 1950an dan negosiasi dengan Soviet dari larangan ini menjadi langkah awal yang penting bagi banyak rencana kebijakan.

Terkait dengan masalah yang ingin di ketahui lebih jauh adalah persoalan dari pemerintah Amerika pada saat itu mengalami kesulitan dalam mendefinisikan kepentingan nasionalnya menanggapi masalah kerjasama pelucutan senjata nuklir dengan Uni Soviet. Dengan itu, Amerika membutuhkan masukan berupa gagasan, ide, dan pandangan akademis yang membantu Amerika dalam memutuskan kebijakan politik internasional yang akan diambilnya. Gagasan-gagasan inovatif itu datang dari kalangan *scientific (epistemic community)*. Kondisi tersebut sesuai dengan apa yang digambarkan oleh perspektif kognitivisme. Pada dasarnya kaum kognitivis percaya pada peranan hal-hal atau unsur-unsur non-material yaitu pada ide, pengetahuan dan *science* yang menentukan kepentingan.

Peter Haas secara lebih spesifik mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat tiga syarat apakah ilmuwan dapat mempengaruhi kebijakan .Pertama, di saat pembuat kebijakan dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidak pasti hal ini juga dialami pemerintah AS pada waktu itu. Dimana sulit sekali merumuskan untuk merugikan menghentikan perlombaan senjata. Kedua, ada atau tidaknya advis kebijakan yang menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan adanya *principled belief*, *causal belief*, konsep validitas bersama, dan proyek kebijakan bersama sebagai ciri dari sebuah komunitas sepistemik. Pada waktu itu kaum akademisi cukup solid di dalam mengkonstruksi sebuah konsep *Anti Ballistic Missile (ABM)* dengan berbagai saran yang secara akademis dapat diterima dengan baik. Ketiga, para anggota epistemic mendapatkan kekuasaan politik. Walaupun dengan perjuangan panjang, pada akhirnya parapakar tersebut dilibatkan dalam system kekuasaan. Denganposisi ini, berbagai advis mereka akan lebih mendapatka apresiasi, respon , dan dukungan.

Bagaimana peranan *epistemic community* dalam mendorong Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan pembatasan persenjataan strategis (khususnya dalam hal senjata nuklir) pada akhir Perang Dunia II dilihat dari perspektif kognitivisme?



1. Tinjauan Pustaka

Perspektif *rational choice* menganggap negara memiliki kepentingan nasional yang kuat dan dianggap bisa mengkalkulasi *cost and benefit*. Permasalahannya ada negara yang tidak bisa mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas dan tidak bisa mengkalkulasi *cost and benefit*. Karenanya, muncullah perspektif *cognitivism* yang percaya akan pentingnya ide, *knowledge*, persepsi dalam menentukan kepentingan, dalam mengkalkulasi *cost and benefit*. Perspektif *Rational Choice* berbasis materi, keuntungan berupa materi, tapi dalam *cognitivism* belum tentu berupa materi, ada hal-hal yang non-materi yang mengantarkan suatu negara ke kerjasama, yaitu bisa berupa ide, pengetahuan atau persepsi.

Ide tersebut memiliki sedikitnya 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai *Road Map*, yaitu berfungsi memberi petunjuk untuk menentukan pilihan. Selain itu, ide juga berfungsi sebagai *vocal point*, yaitu jika negara dihadapkan pada banyak pilihan tetapi ia tidak mengetahui pilihan yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai perspektif *cognitivism*.

Bagaimana ide menentukan kepentingan? Peter M. Haas menjelaskannya dengan konsep *Epistemic community*. Ketika negara tidak memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kepentingan, maka negara akan meminta bantuan orang-orang yang ahli. Mereka adalah yang disebut dengan *Epistemic community*. *Epistemic community* adalah suatu jaringan orang-orang profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam suatu wilayah *science* yang memiliki otoritas untuk mengusulkan atau membuat kebijakan berdasarkan ilmunya. *Epistemic community* selain merupakan kumpulan dari orang-orang yang profesional dari berbagai disiplin dan latar belakang.

Secara lebih spesifik, beberapa alasan kemunculan komunitas ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, munculnya Negara administratif yang modern dimana sangat dibutuhkan peranan "elit pengetahuan" untuk melihat dan menghadapi bermacam-macam masalah dan kompleksitasnya. *Kedua*, kompleksitas, ketidakpastian dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan bertambahnya jumlah actor dan pola interaksi yang semakin kompleks. *Ketiga*, kecenderungan menguatnya peranan (birokrasi) Negara dalam konteks pengaturan fungsi-fungsi di dalamnya yang diarahkan untuk memperoleh keuntungan dari perkembangan ekonomi politik global.



Gagasan utama dalam penelitian ini adalah ketika Amerika Serikat menemui kesulitan dalam mendefinisikan kepentingan dan kesulitan dalam menghitung cost and benefit dalam permasalahan penghentian perlombaan senjata nuklir, maka ia membutuhkan masukan berupa ide, gagasan, persepsi dan pengetahuan dari *epistemic community*. Dalam konteks perang dingin, *epistemic community* memiliki peran yang cukup signifikan sehingga pada akhirnya Amerika Serikat mau menandatangani persetujuan tersebut. Peranan yang cukup signifikan itu ditunjukkan dengan kemampuan *epistemic community* dalam meyakinkan pemerintah Amerika Serikat tentang dampak negatif dari perlombaan senjata nuklir.

PEMBAHASAN

Epistemic community dalam hal pengendalian senjata untuk memberikan pemahaman mengenai kerjasama internasional, membantu dalam membangun suatu ekspektasi-ekspektasi secara teoritik yang berasal dari kelompok ahli-ahli nasional dan yang telah dipilih oleh pemerintah U.S sebagai dasar negosiasi dengan pihak Soviet. Yang pada akhirnya merupakan awal dari lahirnya suatu rezim keamanan parsial ABM. Meskipun pada akhirnya ekspektasi-ekspektasi ini merupakan suatu bentuk-bentuk “renegosiasi” di meja perundingan dimana kemudian pihak Amerika mengupayakan lebih pada pendekatan politik (*political approach*) dalam hal pengendalian senjata.

Kontrol dari *epistemic community* sebagai ilmuwan informal (di luar struktur kelembagaan pemerintah) dan rakyat sipil yang memiliki kemampuan strategis dalam segi intelektual. Pasti banyak dari anggota *epistemic community* yang tidak dapat melakukan dan bekerja dengan baik, kadang-kadang mereka juga mengalami *institutional conflicts*. Banyak dari mereka yang mempunyai kontribusi intelektual dalam bidang-bidang kepemilikan dari keahlian dan strategi nuklir dengan memunculkan diskusi, argumen, dan *mutual criticism*. Hal tersebut dapat menolong mereka membentuk konsensus yang didasarkan pada konsep-konsep yang ada, mengatasi hambatan interdisipliner dan menciptakan *common vocabulary*. Selanjutnya kesemuanya itu dapat dimantapkan dengan mengutarakannya kepada *policy makers* yang nota bene mempunyai kekuatan teknologi, *military superiority* dan “victory” in nuclear war.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mempergunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pengakuan untuk *epistemic community* bukan hanya berdasarkan *sharing* dari kriteria epistemik, tetapi juga atas dedikasi aktif dari para ahli yang diakui secara kolektif dan kemampuan mereka untuk *come up* dengan usulan-usulan dan argument-argumen baru tentang *arms controllers*. Hal itu membutuhkan integritas ilmu pengetahuan untuk kemudian melegitimasi dan kekuasaan dalam kerangka sistem politik yang ada. Mereka mempunyai *public figure* yang tentu mempunyai kekuatan legitimasi, dan mempunyai *personal link* dengan *policy makers* (seperti Paul Nitze). Mereka berpartisipasi dalam proyek pemerintah dan mengadakan negosiasi sepanjang mereka pesimis tentang solusi teknologi untuk perang nuklir yang berbahaya. Kita harus berhati-hati tidak untuk the arms control epistemis dengan sebuah profesi. Community tersebut berlawanan dengan profesi, didalamnya hanya bagian dari waktu. Mereka mengungkapkan resiko dari setiap keputusan yang dikeluarkan aktor-aktor dan standar mereka dari code profesional. Komunitas ini dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi, *political driven*, yang berisi ideologi sendiri, dan contoh yang representatif mewakili keseluruhan perbedaan dari "scientific state".

Pada tahun 1955-1960 muncul pemahaman baru tentang konsep perang berdasarkan asumsi bahwa perlombaan nuklir dapat menyebabkan instabilitas dalam politik internasional. Aktor-aktor ABM (Anti Ballistic Missile) system kemudian menjadi kelompok pertama yang menentang perang nuklir dan membela anti perang nuklir dengan mendasarkan gagasan mereka pada metode ilmu pengetahuan. Mereka juga mendesak organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah nasional dalam menciptakan keputusannya bahwa keadaan bahaya karena perang nuklir tidak mempunyai solusi moral. Untuk meredakan keadaan tersebut, maka perlu dimunculkan *prudential behaviour* dalam melakukan diplomasi.

Hal penting dari makalah ini adalah membawa fakta bahwa kerjasama yang diputuskan para ilmuwan Amerika kembali ke sistem politik Uni Soviet, dimana mereka menjadi satu kelompok yang memahami tentang apa yang harus dilakukan untuk mengontrol permasalahan perlombaan nuklir. Sebagai contoh Walt Rostow dan Jerome Wiesner sebagai aktor yang bermain didalam pemerintahan Kennedy membicarakan permasalahan keamanan internasional dengan Soviet di Moskow dalam pertemuan Pugwash pada Desember 1960 dan mereka kembali dengan selucutan senjata dengan keyakinan bahwasannya US siap untuk menerima



kerjasama pengendalian senjata. Pertemuan Pugwash membawa kesepakatan perjanjian larangan percobaan atau hal serupa, tapi yang lebih penting lagi, peraturan dalam perkembangan beberapa teknik yang mendasar untuk pengendalian senjata.

Gagasan *Epistemic community*

Sub tema ini akan lebih banyak berbiara tentang alasan negara-negara dalam menerapkan teknologi nuklir, khususnya dalam ranah keamanan/militer, politik, dan ekonomi.

Dari segi militer

Hans J. Morgenthau menyatakan dalam bukunya *Politics Among Nation*, bahwa khususnya dalam politik internasional, kekuatan militer sebagai suatu ancaman atau sebagai suatu potensi, adalah faktor material terpenting dalam membentuk “powers politics” suatu bangsa, dimana hubungan-hubungan psikologis lebih ditonjolkan di dalam interaksi antar negara. Maksudnya jelas bahwa kekuatan militer lebih sering digunakan sebagai pendukung tujuan-tujuan yang akan dicapai, tanpa harus benar-benar menggunakannya dalam memaksakan penyelesaian sengketa. Demikianlah kekuatan militer merupakan salah komponen penting dalam memenangkan perang diberbagai medan pertempuran di Asia Pasifik maupun di Eropa dalam Perang Dunia II, dan juga dalam Perang Dunia I. pemilikan system persenjataan system nuklir dipandang akan mampu mencegah negara lain untuk melancarkan serangan lebih dahulu. Pemilikan system persenjataan nuklir secara teoritis tidak selalu membutuhkan biaya yang \sangat besar, karena tidak ada beharusan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Tetapi hal yang harus diperhitungkan adalah bahwa resiko dari pemilikan persenjataan nuklir adalah dapat menimbulkan resiko yang sangat besar, karena akan membawa kepada suatu perang nuklir.

Tentang ini dapat diberikan ilustrasi sebgai berikut : umpamanya saja Uni Soviet dan Perancis, yang sama-sama memiliki persenjataan nuklir, terlibat dalam konflik bersenjata terbuka, dan Uni Soviet menyerang Perancis terlebih dahulu. Yang harus diperhitungkan oleh kedua belakh pihak ialah apa yang akan terjadi kemudian, mengingat al itu sungguh berbahaya bagi keduanya. Dan apakah perang nuklir yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

timbul itu tidak akan menghancurkan dunia, kalau diingat perancis juga memiliki sekutu-sekutu, yaitu Aerika Serikat dan Inggris serta negara-negara Eropa Barat lainnya. Dengan demikian sulit dikatakan hal ini dapat terjadi secara gegabah mengingat resiko yang begitu dashyat yang harus dipertanggung jawabkan. Dapat dikatakan, bahwa baik bagi pihak Uni Soviet maupun bagi Amerika Serikat, penggunaan nuklir dalam sistem persenjataan dan pertahanan adalah sebagai jawaban untuk memelihara kepentingan nasional yang berada jauh di luar tapal batas negara sendiri, atau dalam rangka strategi politik global. Strategi ini hanya dimungkinkan apabila ditunjang dengan suatu sistem teknologi militer yang tinggi. Dalam perang total yang mungkin terjadi di masa mendatang, pasukan-pasukan militer akan dihadapkan kepada bentuk ancaman baru, sebagai akibat digunakannya senjata nuklir. Efek ledakan senjata nuklir dalam waktu yang singkat akan menimbulkan kehancuran terhadap bangunan gedung atau material yang meliputi daerah sasaran yang luas. Selain itu akan timbul kebakaran yang luas, terjadinya korban missal dalam berbagai tingkat dan efek panas yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir serat daya musnah yang disebabkan.penghancuran yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir terutama disebabkan oleh pelepasan sejumlah besar energy yang terkandung di dalamnya. Energy ini terlepas ke segala arah dari pusat ledakan. Tiga penyebab utama yang akan menimbulkan kehancuran paling besar di sekitar daerah ledakan nuklir, yaitu hempasan, panas, dan radiasi.

Dari Segi politik

Bila ditinjau dari segi politik penggunaan nuklir dalam system persenjataan suatu negara, maka dapatlah dikatakan, bahwa persenjataan nuklir dapat dianggap memberikan sumbanagan bagi terjaminnya kemerdekaan suatu bangsa dari intervensi pihak luar. Karena bila suatu negara lain berani mencoba mengganggu kemerdekaan dan integritas wilayah suatu negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka konsekuensinya berbahaya sekali. Dengan demikian, nuklir dianggap memberikan jaminan tertinggi bagi kemerdekaan suatu negara. Pemilikan senjata nuklir dianggap sebagai isyarat, bahwa negara tersebut tidak mau ditempatkan sebagai negar kelas dua oleh negara yang lebih kuat.pemilikan senjata-senjata nuklir oleh suatu negara akan meningkatkan prestisenya dalam dunia internasional, karena negara itu telah memiliki kemampuan yang tinggi, baik dalam lingkungan regional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan/atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

maupun di mata dunia internasional. Sehingga prestise dari suatu bangsa dewasa ini diukur dengan perkembangan industrinya, kemampuan ilmiah serta teknologinya. Kemampuan untuk memiliki nuklir tidak terlepas dari perkembangan teknologi tinggi yang dimiliki suatu negara, dan tidak pula dapat dipisahkan dari kemajuan di bidang ekonomi maupun industry. Dengan sendirinya kemampuan nuklir selalu dimiliki oleh mereka yang telah mampu mengembangkan system teknologi muktahir. Efek psikologis dari perluasan dan peningkatan kesanggupan persenjataan nuklir ini bagi negara-negara sekutu, merupakan kebanggaan tersendiri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam perjuangan menyebarkan ideology. Singkatnya dari segi politik dapat dikatakan, bahwa kapasitas nuklir disamping bermanfaat bagi nuklir itu sendiri, bermanfaat pula bagi anggota simpatisan, bagi penyebaran ideology pada masa lalu. dorongan untuk membuat senjata nuklir terjadi karena dianggap mampu membuat senjata-senjata nuklir yang dianggap memberi keuntungan politik, paling tidak di dalam lingkungan kawasannya.

Dari segi ekonomi

Tidak disangsikan lagi, bahwa negara yang telah mampu membuat senjata nuklir sendiri mempunyai kemampuan teknologi yang cukup tinggi, juga dalam usaha-usaha pengembangan dan pembangunan. Ditinjau dari sudut ekonomi, membuat beberapa senjata nuklir akan mengirit anggaran belanja militer. Kemudian nuklir tidak saja digunakan di bidang militer sebagai penunjang ketahanan nasional, akan tetapi dapat pula dimanfaatkan sebagai penunjang strategi politik global serat penunjang perekonomian.

Pemanfaatan nuklir sebagai penunjang perekonomian negara dikembangkan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, serta beberapa negara lain, yaoitu digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, yang lebih dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nuklir (PLTN). Berbagai tanggapan di kalangan luas mengatakan bahwa semakin banyak negara yang memiliki persenjataan nuklir, akan semakin mengancam perdamaian dunia yaitu dengan mengaitkan penyebaran nuklir akan semakin meningkatkan bahaya dan kegentingan yang timbul. Bahkan menurut Dougherty, "dahulu ada sarjana dari Uni Soviet yang mengemukakan, bahwa bahaya dari penyebaran nuklir dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = N^2$$



Keterangan: “r” menunjukkan pada risiko akan timbulnya perang nuklir, sedangkan “N” menunjukkan jumlah negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir.

Jika kita melihat efek-efek jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa suatu negara yang telah masuk dalam kelompok negara nuklir, tidak akan berhenti pada tingkatan pertama saja, tetapi ia akan mengembangkan kemajuannya kepada tingkat yang lebih tinggi, demi tujuan militer dan maksud-maksud politik dalam forum internasional. Kalau demikian maka penyebaran nuklir pada berbagai negara akan mematahkan arti penting basis-basis power tradisional seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kapasitas industry, dan jarak, dengan demikian condong mengurangi perbedaan antara negara kecil dan negara besar.

Yang jelas “power” dan “influence”, seperti yang telah dikemukakan diatas, tidak lagi memusat dalam tangan dua raksasa barat dan timur, karena pemilikan senjata nuklir telah menyebar pada lebih dari banyak negara, yang juga merupakan anggota kelompok nuklir, yang tidak lagi selalu dikaitkan dengan system pertahanan dan “power”. Nuklir merupakan salah satu sebab dari semakin mengendornya pola bipolaritas di system internasional, dan bahkan mengarah pada suatu system multipolaritas di system internasional, dan bahkan mengarah pada suatu system multipolaritas dimana “power” dan “influence” menyebar dalam beberapa pusat.

Perspektif Kognitivisme

Pemerintah Amerika pada saat itu mengalami kesulitan dalam mendefinisikan kepentingan nasionalnya menanggapi masalah kerjasama pelucutan senjata nuklir dengan Uni Soviet. Dengan itu, Amerika membutuhkan masukan berupa gagasan, ide, dan pandangan akademis yang membantu Amerika dalam memutuskan kebijakan politik internasional yang akan diambilnya. Gagasan-gagasan inovatif itu datang dari kalangan *scientific (epistemic community)*. Kondisi tersebut sesuai dengan apa yang digambarkan oleh perspektif kognitivisme. Pada dasarnya kaum kognitivistis percaya pada peranan hal-hal atau unsur-unsur non-material yaitu pada ide, pengetahuan dan *science* yang menentukan kepentingan.

Peter Haas secara lebih spesifik mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat tiga syarat apakah ilmuwan dapat mempengaruhi kebijakan. Pertama, di saat pembuatan kebijakan dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi.



Ketidakpastian ini juga dialami pemerintah AS pada waktu itu. Dimana sulit sekali merumuskan untuk rugi jika menghentikan perlombaan senjata. Kedua, ada atau tidaknya advis kebijakan yang menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan adanya *principled belief*, *causal belief*, konsep validitas bersama, dan proyek kebijakan bersama sebagai cirri dari sebuah komunitas epistemik. Pada waktu itu kaum akademisi cukup solid di dalam mengkonstruksi sebuah konsep *Anti Ballistic Missile* (ABM) dengan berbagai saran yang secara akademis dapat diterima dengan baik. Ketiga, para anggota epistemic mendapatkan kekuasaan politik. Walaupun dengan perjuangan panjang, pada akhirnya para pakar tersebut dilibatkan dalam sistem kekuasaan. Dengan posisi ini, berbagai advis mereka akan lebih mendapatkan apresiasi, respon, dan dukungan.

Epistemic community yang telah melahirkan konsep *Anti Ballistic Missile* (ABM) yaitu pengendalian terhadap senjata nuklir yang pada akhirnya gagasan tersebut menjadi faktor pendorong bagi Amerika dan Uni Soviet untuk mengadakan negosiasi-negosiasi mengarah pada kerjasama ABM *treaty*. ABM *treaty* merupakan titik kulminasi setelah dekade panjang sebagai hasil perumusan ide-ide Amerika (perubahan konsep perlucutan senjata nuklir menjadi pengendaliannya) yang ditujukan pula untuk Uni Soviet. Perumusan ide Amerika ini mendapat respon dari pihak Uni Soviet hingga akhirnya Amerika-Uni Soviet mengadakan perjanjian tentang senjata nuklir.

Apa yang dilakukan oleh komunitas epistemik dapat dijelaskan dalam beberapa tahap sebagai berikut (Emanuel Adler dan Haas): Pertama, komunitas mempengaruhi framing isu pada tahap *policy innovation* yaitu berupa suplai informasi yang mencukupi, yaitu dengan memberikan kerangka dalam masalah-masalah controversial, mendefinisikan kepentingan negara, dan menciptakan standar operasional. Kedua, komunitas dapat berperan sebagai agen untuk menyebarkan gagasan alternative kebijakan (*policy diffusion*). Hal ini seperti yang dilakukan komunitas epistemic di Amerika serikat yang berusaha meyakinkan komunitas lain pada level internasional. Ketiga, komunitas menggunakan pengaruhnya ketika memasuki *policy selection* yang biasanya kental dengan nuansa politik. Terakhir, komunitas memainkan peran kunci dalam rangka pemeliharaan rezim (*regime persistence*) dengan menggunakan rezim yang ada untuk mengatasi berbagai persoalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ABM *treaty* yang telah disepakati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dan terus berkembang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada dewasa ini.

Pendekatan *Epistemic community* memiliki beberapa “*comparative advantages*”. Pertama, mereka memberikan pemahaman mengapa kerjasama diantara negara-negara *superpower* dikonseptualkan dengan adanya pengendalian senjata. Kedua, meningkatkan sensitivitas kita terhadap faktor-faktor politik domestik, terutama mengenai adanya gagasan dimana tiap-tiap aktor nasional memiliki interpretasi berbeda-beda akan kepentingan nasional sebagai tandingan untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk dari agenda internasional berikut praktek-praktek internasionalnya. Ketiga, adalah adanya penelitian empirik. *Epistemic community* menunjukkan perhatian pada *impact* dari pengetahuan *scientific* proses kerjasama internasional. Keempat, pendekatan ini memperlihatkan bahwa negara lebih *socialized* tidak hanya pada hambatan struktural, tetapi juga turut memberikan pemahaman pada dunia. Kelima, *epistemic community* dapat membantu kita melihat bahwa disamping atau bahkan karena adanya ketidaksetujuan negara-negara *superpower* terhadap kepentingan dan visi politik. Namun pada kenyataannya Uni Soviet pada level tertentu memahami apa yang menjadi perhatian Amerika mengenai perlombaan senjata, dan instabilitas krisis senjata. Terakhir, adanya kesamaan pemahaman antara *epistemic community* Amerika dan *epistemic community* Uni Soviet untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Emanuel, ---, *The Emergence of Cooperation national Epistemic Community and The International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control*, ---
- Betts, Richard K. (Ed.), 2002, *Conflict After The Cold War: Arguments on Causes of War and Peace (Second Edition)*, New York: Pearson Education, Inc.
- Churchill, Scott. 2001. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Cantor, Robert D.. 1986. *Contemporary International Politics*. Minnesota: West Publishing Company.

Collins, Alan. 2003. *Security and Southeast Asia*. Boulder. Colorado: Lynne Rienner.

Coulombis, Theodore dan James Wolfe. 1986. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Jersey: Prentice-Hall.

Coyle, William dan Zhi Wang. 1998. "Economic Integration and Open Regionalism in APEC: The Gains for U.S. Agriculture". *Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture/AER-771*.

Diplin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princenton University Press.

Frankel, Jeffrey dan Shang-Jin Wei (1998). "Open Regionalism in a World of Continental Trade Blocs." *IMF Working Paper WP/98/10*.

Garnaut, Ross. 2004. *A New Open Regionalism in the Asia Pacific*. Makalah dipresentasikan pada the International Conference on World Economy, Colima, Mexico, 25 November, 2004 (diunduh pada 31 Oktober 2008 dari situs rspas.anu.edu.au/economics/publish/papers/garnaut/2004_1125_Regionalism.pdf)

Ichikawa, Hiroya. 1997. "Constant-Market-Share Analysis and Open Regionalism: A Study Suggestion. dalam Omura, Keji (ed). 1997. *The View of Economic and Technology Cooperation in APEC*. Tokyo: APEC Study Center Series

Kelegama, Saman. 2000. Open Regionalism in the Indian Ocean. How relevant is the APEC model for IOR-ARC?. 257. *Journal of the Asia Pacific Economy* 5(3) 2000: 255–274.

Kissinger, Henry A., 1969, *Nuclear Weapons and Foreign Policy (Abriedged Edition)*, New York: W.W. Norton & Company. Inc.

Nasution, Dahlan, 1991, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga

Berbagai situs internet terpercaya





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pizarro, Ramiro. 1999. Comparative Analysis of Regionalism in Latin America and Asia-Pacific, Comercio Internacional Serie. United Nations publication, Sales No. E.99.II.G.21.

Muggie, John Gerard. 1998. Constructing the World Politics: Essays in World International Institutionalization. London: Routledge.